

## Wagub DKI: Ganjil Genap Nataru akan Diperluas

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya berencana memperluas jalur ganjil-genap (Gage) di malam Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 nanti, yang saat ini baru berjumlah 13 ruas. Hal itu, kata dia sudah jelas akan dilakukan, meski ganjil-genap masih dirumuskan.

"Jadi memang nanti semua dinas terkait, unit terkait, nanti akan menyesuaikan ini semua. Sedang didiskusikan, sedang didialogkan," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu (24/11).

Ditanya di mana saja ruas-ruas penambahan itu, Riza mengaku belum bisa menjawab lebih jauh. Namun demikian, dia berjanji akan menyampaikan informasi tersebut di waktu dekat.

"Ya nanti dari berapa ruas nanti apakah diperluas lagi atau bagaimana, nanti kita akan lihat jadi semuanya kita akan diputuskan yang terbaik. Terkait pengaturan ganjil genap kapasitas jam operasional juga semua nanti akan disesuaikan," tuturnya.

Menurutnya, hal itu juga baru saja dipertimbangkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga pada 24 hingga 2 Januari 2022. "Ini juga lagi kita pertimbangkan ya, nanti ya," kata Riza.

Dia mengatakan, pembatasan pada saat Nataru, memang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, khususnya, semua unit usaha. Terkait hal itu, kata Riza, pihaknya akan bertemu dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Nanti akan merumuskan yang terbaik kebijakannya melalui surat edaran masing-masing ya," tutur dia.

Untuk menghentikan laju kasus Covid-19 jelang Nataru, kata dia, pihaknya meminta masyarakat Ibu Kota agar memperketat protokol kesehatan jelang libur Nataru. Menurut dia, hal itu berdasarkan kondisi pada dua tahun terakhir selama masa libur panjang. "Kita harus berjuang bersama, konsisten melaksanakan protokol kesehatan supaya di masa libur akhir tahun ini tidak lagi terjadi peningkatan penyebaran Covid-19," ujar Riza.

Riza menambahkan, sejauh ini capaian penyelesaian Covid-19 di DKI Jakarta sudah semakin membaik. Terlebih, ketika kasus baru mulai ditekan sedemikian rupa, selain dari angka vaksinasi yang disebutnya terus bertambah. "Harapan kita PPKM juga membaik terus, kita sudah di level 1, mudah-mudahan tidak menimbulkan klaster baru, tidak ada gelombang ke-3 di seluruh DKI Jakarta," jelasnya. ● yan

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



## AKSI DONOR DARAH HUT KORPRI DI DPR

Duta Donor Darah Indonesia yang juga Anggota DPR Krisdayanti (kiri) mengikuti aksi donor darah dalam rangka HUT Korpri ke-50 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11). Aksi donor darah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok darah di Ibu Kota yang masih dilanda pandemi Covid-19 dengan harapan bisa mencapai target PMI Jakarta 1.000 kantong per hari.

## BPBD DKI: Potensi Angin Kencang Sudah Menjauh dari Jabodetabek

Berdasarkan data dari BMKG, (angin kencang) sudah habis, sudah hilang hari ini dan menjauh ke arah barat dari selatan. BMKG juga memprediksi fenomena angin kencang berkurang dalam 24 jam seiring dengan melemahnya Siklon Tropis Paddy, kata Kepala Seksi Pencegahan BPBD DKI Jakarta, Rian Sarsono.

JAKARTA (IM) - Badan Daerah atau BPBD DKI Jakarta mengungkapkan fenomena

angin kencang sebagai dampak dari Siklon Tropis Paddy sudah menjauh dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Jabodetabek.

"Berdasarkan data dari BMKG juga, (angin kencang) sudah habis, sudah hilang hari ini dan menjauh ke arah barat dari selatan," kata Kepala Seksi Pencegahan BPBD DKI Jakarta, Rian Sarsono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (24/11).

Berdasarkan keterangan dari BMKG, keberadaan Siklon Tropis Paddy di Samudera Hindia selatan Jawa Tengah

bertekanan 997 mb dengan kecepatan angin maksimum mencapai 40 knot (75 km per jam).

Fenomena angin kencang tersebut terjadi karena adanya aliran massa udara yang cukup kuat dari wilayah Samudera Hindia sebelah barat Banten yang bertiup ke arah timur hingga di sekitar wilayah utara Tangerang dan Jakarta.

BMKG juga telah memprediksi fenomena angin kencang berkurang dalam 24 jam seiring dengan melemahnya Siklon Tropis Paddy.

Namun demikian, Rian menegaskan, kesiapsiagaan personel terus dilakukan sejak DKI Jakarta memasuki musim hujan, meskipun fenomena angin kencang sudah berlalu.

BPBD DKI juga terus melakukan sosialisasi dan peringatan potensi fenomena cuaca lainnya melalui media sosial agar masyarakat selalu waspada.

Pemangkasan pohon-po-

hlon tua, rapuh dan rawan tumbang di jalan protokol juga dilakukan dengan berkoordinasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna mengantisipasi pohon tumbang.

BPBD juga mengimbau agar masyarakat menghindari pohon-pohon lebat yang tinggi dan rawan ketika terjadi angin kencang, serta sebisa mungkin untuk tetap berada di rumah.

Jika melihat pohon dengan kondisi rapuh, terlalu rimbun dan menggangu kabel atau fasilitas umum, masyarakat dapat melapor ke kelurahan atau pihak terkait.

Demi keselamatan, masyarakat diimbau untuk tidak memotong pohon sendiri tanpa bantuan pihak berwenang.

"Jika terjadi kondisi ke darurat, bisa menghubungi ke 112 atau bisa melaporkan ke (aplikasi) JaKi untuk melaporkan pohon lebat dan rawan tumbang," kata Rian. ● yan



FOTO: ANI

**PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DI JAKARTA** Pekerja menyelesaikan pembuatan sumur resapan di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (24/11). Pemprov DKI Jakarta membuat sumur resapan atau drainase vertikal di berbagai wilayah di Jakarta guna mengantisipasi banjir.

## Petugas Gabungan Gerebek Lumpur di Kali Sunter

JAKARTA (IM) - Petugas gabungan dari beberapa instansi melakukan kegiatan gerebek lumpur di Kali Sunter, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, untuk mengantisipasi banjir di wilayah tersebut.

Lurah Cipinang Melayu, Aroyantoro mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan petugas dari UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga warga sekitar.

"Dari tiga kelompok ini kita melakukan di dua RW, yaitu RW 10 dan RW 12," kata Aroyantoro di Jakarta, Rabu (24/11).

Aroyantoro mengatakan, total ada sebanyak 30 petugas

gabungan yang dikerahkan untuk membersihkan lumpur dan eceng gondok dari Kali Sunter. Pembersihan tak hanya dilakukan secara manual, namun juga mengerahkan satu unit alat berat atau ekskavator untuk mengangkat endapan lumpur.

"Dari hasil evaluasi kita, hari ini karena banyaknya lumpur dan eceng gondok yang menyumbat aliran air ini yang kita coba bersihkan dari saluran," ujar Aroyantoro.

Dia menambahkan, gerebek lumpur di Kali Sunter tersebut dilakukan selama tiga hari ke depan. "Karena memang untuk satu hari ini kurang cukup ya dari panjangnya kali dan dari SDM-nya," tutur Aroyantoro. ● yan

## Jakarta Pusat dan Jaksel Sepakati Penataan Kali Grogol Bersama-sama

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sepakat melakukan penataan Kali Grogol secara bersama-sama. Penataan berupa pengurasan dan pelepasan kali itu dibicarakan bersama kedua pihak kemarin.

"Permasalahan aliran sungai itu harus dilihat secara sistemik. Artinya tidak bisa melihat dari satu sisi aliran sungai saja, karena aliran sungai memiliki keterkaitan satu sama lain dari selatan menuju ke pusat," ujar Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma dalam keterangannya, Rabu (24/11).

Dhany mengatakan hal teknis mengenai penataan Kali Grogol selanjutnya bakal dirapatkan di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kedua Pemkot nantinya bakal menyusun roadmap kolaboratif pengelolaan kali sepanjang 7 kilometer tersebut.

Selain dengan Pemkot,

penataan Kali Grogol juga bakal melibatkan pengelola Golf Senayan. Sebab, Kali Grogol melintas di area tersebut.

"Akan ada penyatuan persepsi termasuk juga dengan pengelola golf Senayan dari sisi teknis, supaya aktivitas golf juga bisa berjalan, penataan atau pengerukan Kali Grogol berjalan," kata Dhany.

Sementara itu Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin mengatakan, pihaknya bersama Pemkot Jakarta Pusat bakal segera menggelgar pertemuan kembali Selasa mendatang. Kesepakatan penataan Kali Grogol ini, menurut Munjirin, penting agar tidak ada tumpang tindih dalam hal teknis maupun administrasi.

"Semua adalah tugas kita bersama jadi enggak mungkin kali (sungai) dipisah di tengah-tengah. Jadi kali kita ya kali Jakarta Pusat juga," kata Munjirin. ● yan

## WASPADA GELOMBANG TIGA COVID-19

## Pemprov DKI Pastikan Semua Rumah Sakit Siap

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tetap menyiapkan rumah sakit rujukan Covid-19 dengan jumlah tempat tidur yang sama meski saat ini kasus sedang melandai.

"Semua sarana dan prasarana dukungan tenaga kesehatan, semuanya siap, apalagi kita masih di musim hujan, tentu lebih lagi persiapannya," kata Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (24/11).

Menurut Riza, hal ini dilakukan untuk mencegah gelombang ketiga Covid-19 yang diwaspadai terjadi setelah libur Natal dan Tahun Baru 2022.

"Semua persiapan nakes, faskes, tidak ada yang dikurangi,

semua *standby*," kata Riza.

Selain Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat juga telah memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021 sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712/2021, Nomor 1/2021, Nomor 3/2021 soal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Hal ini guna mencegah terjadinya mobilisasi masyarakat dan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Sedangkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga di larang mengambil cuti sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 13 Tahun 2021. Epidemiolog dari Griffith

University Australia, Dicky Budiman mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI tetap perlu mewaspadai potensi ledakan kasus di gelombang ketiga.

Alasannya, Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia yang secara otomatis menjadi pusat kegiatan masyarakat, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Di balik baiknya pengendalian pandemi, Dicky menyebut DKI Jakarta paling rawan terjadi ledakan gelombang ketiga Covid-19.

"Karena di Jakarta orang keluar masuk dari berbagai daerah. Itu yang membuat Jakarta bisa terdampak gelombang ketiga," ujar Dicky lewat pesan pendek pada Senin (11/10) lalu. ● yan

## Wali Kota Bekasi Tinjau Peternakan Kambing di Padurenan



FOTO: HUMAS PEMKOT BEKASI

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Herbet Panjaitan (tengah) saat meninjau ternak kambing di Padurenan, Selasa (23/11).

KOTA BEKASI (IM) - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Herbet Panjaitan melihat kondisi kambing yang dikelola salah satu warga, Darmansyah di Padurenan, Mustikajaya, Selasa (23/11).

Peternakan kambing atau domba yang dikelola masyarakat melalui Dinas Ketapang setempat itu berjumlah sekitar 100 kelompok atau 100 kandang. Kelompok itu menyebar di 11 kecamatan, 37 kelurahan.

Dalam rilis Humas Pemkot Bekasi, Selasa (23/11) sore disebutkan, peternakan yang dikelola Darmansyah, Pemer-

intah Kota Bekasi memberikan satu ekor kambing jantan dan sepuluh ekor kambing betina.

Rahmat mengharapkan, kambing yang diberikan bisa menjadi kambing atau domba yang baik untuk kemudian bisa diperjualbelikan di pasar dalam kondisi sehat.

Peternakan itu sebagai adopsi dari hasil studi banding ke Sleman sebagai penghasil ternak terbaik dengan sistem kandang yang tidak mengganggu penciuman serta pengelolaan kotoran yang tidak meresahkan warga.

Akan tetapi, Rahmat mengusulkan agar kandang dibuat setradisional mungkin dengan menggunakan bambu atau

kayu. Sehingga, alokasi dana bisa dibelikan induk kambing dan masyarakat bisa merasakan daya saing dalam pengelolaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Herbet Panjaitan mengatakan, jika pengelola itu diberikan subsidi seperti, pakan konsentrat sebanyak 2 ton dan rumput bibit odot sebanyak 10 kilo per kelompok.

Dari hasil perkawinan kambing jantan dengan 10 kambing betina itu, kata Herbet, diharapkan bisa melahirkan banyak anak sehingga pengelola akan terus berjalan dalam usahanya. mdl

## Pemprov DKI Usulkan Belanja Hibah 2022 Sebesar Rp2,76 T

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan belanja hibah 2022 sebesar Rp 2,76 triliun. Angka ini tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 yang saat ini sedang dibahas Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.

"Total belanja hibah dalam KUA PPAS 2022 sebesar Rp 2,76 triliun. Angka ini masih bisa berubah karena sedang dibahas, yang akhirnya nanti kalau sudah ditetapkan dalam peraturan daerah APBD 2022," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, di Jakarta, Rabu (24/11).

Belanja hibah ini, kata Anggara, mencakup belanja hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa serta tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di eksekutif.

Dana hibah ini tidak hanya diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, tetapi juga ada yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

"Kita harapkan dana-dana hibah tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bisanya diberikan setelah kita memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan," tandas Anggara.

Berdasarkan dokumen KUA-PPAS DKI Jakarta Tahun 2022, terdapat 20 SKPD yang mendapatkan dana hibah dari APBD DKI di mana SKPD tertinggi yang mendapatkan dana hibah adalah Dinas Pendidikan DKI dengan total Rp 1,53 triliun, lalu disusul Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp 354,3 miliar; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Rp 338,6 miliar; Satuan Polisi Pamong Praja Rp 254,4

miliar dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 93,4 miliar.

Sementara SKPD terendah yang mendapatkan dana hibah adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Rp 335,4 juta; Biro Hukum DKI Jakarta Rp 500 juta; Biro Pemerintahan 602,4 juta; dan Biro Kerja Sama Daerah Rp 1,04 miliar.

Jika merujuk pada dokumen Perda APBD DKI Jakarta maupun perubahannya sejak 2017 lalu, alokasi belanja hibah DKI Jakarta cenderung terus meningkat. Namun, dampak dari pandemi Covid-19 di Jakarta, membuka alokasi dana hibah menurun pada tahun 2022 mendatang di mana pada tahun 2021, alokasi belanja hibah sebesar Rp 3,43 triliun dan tahun 2022 mendatang rencannya Rp 2,76 triliun.

Diketahui, dana hibah di Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan dan polemik karena beberapa alokasinya diberikan kepada organisasi dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan baik di Pemprov maupun di DPRD DKI Jakarta.

Yang muncul ke publik adalah dana hibah di Dinas Sosial Pemrov DKI yang diberikan kepada Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) dan Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI).

Dana hibah untuk kedua yayasan ini menjadi persoalan karena dinilai ada konflik kepentingan di mana YPKP merupakan yayasan yang dipimpin ayah Wagub Ahmad Riza Patria dan BPI merupakan yayasan yang memiliki keterkaitan dengan Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani.

Selain itu, belakangan muncul polemik soal dana hibah di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Pemrov DKI yang diberikan kepada MUI DKI Jakarta sebesar Rp 10,6 miliar yang dikaitkan dengan pembentukan cyber army oleh MUI DKI untuk membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ● yan